

## **Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS**

Yeby Ma'asan Mayrudin  
[yeby.mayrudin@gmail.com](mailto:yeby.mayrudin@gmail.com)

M. Chairil Akbar  
[chairilakbar.set@gmail.com](mailto:chairilakbar.set@gmail.com)

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### ***Abstract***

*This study seeks to conduct a critical analysis of the vision and practice of Political Islam held by the leading Islamic parties in Indonesia, the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB) and the Prosperous Justice Party (PKS). Strategy and the methods adopted by the three parties are not always based linearly with Islamic style. The analysis will be directed at explaining their adaptive actions and changes in response to the concrete political realities and developments. Political Islam will be placed in the context not only in terms of identity and ideological elements but also in its intersection with efforts to achieve the targets of political power and success in general elections both in a short-term and a long term.*

*The authors believe that the theme of Political Islam is very interesting after observing the phenomenon of national politics especially since 2017. Strengthened Islamic identity sentiment over the past two years through the National Movement of Guarding MUI Fatwa or GNPF-MUI has undeniably attracted more public attention. Political mobilization against the case of blasphemy by the Governor of Jakarta at that time had opened crucial political spaces. Thus, the struggle for identity politics in Indonesia has become more dynamic and further study or research is highly needed. The development of the Islamic party in Indonesia to a certain degree shows the irony and paradox.*

*Keywords: Political Islam, Islamic Party, Identity Politics, Election*

## Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang bagaimana fragmentasi partai-partai politik Islam merupakan penegasan politik identitas dari sub-kultur yang menyertainya. Agnes Heller memaknai politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah “perbedaan” sebagai suatu yang khas. Identitas agama dimaknai sebagai kekuatan politik atau alat legitimasi atas dasar normativitas doktrinal transenden. Di samping itu, identitas keagamaan menjadi simbolisasi praktik-praktik politik dan juga implementasinya<sup>1</sup> untuk merangkul simpati dari pengikutnya.

Pasca runtuhnya Orde Baru, muncul fenomena kelahiran partai-partai politik baru yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena kelompok atau organisasi keagamaan –khususnya Islam– yang mendorong pendirian partai-partai politik. Organisasi keagamaan Islam itu adalah NU dan Muhammadiyah, yang berusaha mengambil peran politik. Akan tetapi, tidak kemudian mengkonversi organisasinya berubah atau menjadi partai politik, melainkan kedua organisasi itu memfasilitasi pendirian partai politik sebagai bagian dari politik

<sup>1</sup> Ubed Abdillah S., *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: IndonesiaTera, 2002), h. 16 dan 67.

organisasi tersebut. Meskipun demikian, kedua organisasi tersebut, berujar bahwa mereka tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai-partai yang dibentuknya. Hubungan yang ada, hanya bersifat inisiator dan aspirator. Pada akhirnya, NU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Muhammadiyah memfasilitasi pendirian Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>2</sup> Selain itu, ada juga gerakan keagamaan yang biasa disebut dengan istilah gerakan *tarbiyah*, yang pada 1999 mendirikan Partai Keadilan. Gerakan *tarbiyah* merupakan inisiasi dari para aktifis muda Muslim yang awalnya memfokuskan gerakannya hanya pada lingkup kampus.

Secara kasat mata, jelas bahwa partai-partai politik Islam mengandalkan simbolisasi Islam dalam menggalang pemilih didasarkan atas hubungan emosional keagamaan tersebut. Simbolisasi Islam menurut Azyumardi Azra diharapkan menjadi “lem perekat” antara partai dengan pemilih.<sup>3</sup> Sehubungan dengan itu, ternyata kunci

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare: 2012), h. 141-142.

<sup>3</sup> Azyumardi Azra juga menyatakan hal yang sama, yaitu “memanfaatkan simbolisme agama sebagai perekat massa.” Lihat Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Jakarta: Mizan, 2000), h. 151. Selaras dengan itu, lihat juga M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut*, h. 204.

kekuatan partai menurut O'Donnell dan Scmitter terletak pada kemampuannya mengartikulasikan simbol-simbol identitas partai seperti melalui nama, ideologi, program, dan lambang yang menyatukan antara partai dengan pemilih.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, kemampuan mengartikulasikan menjadi pokok penentu dalam meraih dukungan dari pemilih.

Eickelman dan Piscatori berpendapat bahwa Islam telah menjadi kekuatan dalam konstruksi relasi kuasa, sehingga seringkali dimanfaatkan dalam membangun legitimasi politik. Di samping itu, simbolisasi Islam dinilai efektif sebagai instrumen mobilisasi dukungan.<sup>5</sup> George M. Marsden menyatakan bahwa "Agama tetap merupakan salah satu indikator terbaik terhadap perilaku politik [memilih]. Agama mempunyai banyak hubungan dengan politik. Karena agama membentuk dan memperkuat visi-visi moral."<sup>6</sup> Argumen bahwa agama itu penting pastilah tidak mengejutkan,

<sup>4</sup> Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Scmitter dan Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Penerjemah Nurul Agustina (Jakarta: LP3S, 1993), h. 94.

<sup>5</sup> Eickelman, Dale F. dan Piscatori, James. *Ekspres Politik Muslim*. Penerjemah Endi Haryono dan Rahmi Yunita (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), h. 4-5.

<sup>6</sup> George M. Marsden, *Agama dan Budaya Amerika*. Penerjemah B. Dicky Soetadi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 148-150.

misalnya masyarakat Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara "liberal" hampir selalu memiliki perasaan kedekatan dengan kelompok keagamaan tertentu dan mereka memiliki tingkat keterlibatan keagamaan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan keterlibatan dalam politik.<sup>7</sup>

Dalam tulisan ini, tim penulis hendak memahami serta menggali lebih dalam kemampuan partai-partai politik Islam<sup>8</sup> seperti PAN, PKB dan PKS yang memanfaatkan sentimen identitas keagamaan dan sebagai penegasan politik identitas dari masing-masingnya dalam berkompetisi di arena elektoral.

<sup>7</sup> Dan keterlibatan yang luas ini diperkirakan memiliki pengaruh yang berarti. Namun, ini bukan sekadar luasnya keterlibatan yang membuat Kellstendt memperkirakan terdapat pengaruh agama atas politik. Institusi-institusi keagamaan, dan khususnya gereja-gereja, berperan sebagai "organisasi perantara dalam politik, jalinan organisasi-organisasi yang berdiri di antara individu-individu warga negara dan institusi-institusi pemerintahan" Lihat Lyman A. Kellstendt, "Pentingkah Agama dalam Studi tentang Perilaku dan Sikap Pemilih?" dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstendt ed., *Agama dalam Politik Amerika: Rediscovering the Religious Factor in American Politics*. Penerjemah Ahmad Baiquni (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 423-424.

<sup>8</sup> Partai politik Islam dicirikan dengan karakteristik sebagai partai yang memakai asas Islam, menggunakan simbol formal Islam, dan memiliki konstituen besar dari kalangan Muslim. Jadi, PAN dan PKB yang notabene memiliki basis utama dari konstituen Muslim merupakan partai politik Islam. Lihat Azyumardi Azra, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat," dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), h. 203

## Akar Historis Lahirnya PAN, PKB dan PKS

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pasca tumbangnya rejim Orde Baru begitu beragam dan cenderung terfragmentasi. Pada titik ini, terlihat bahwa para elit politiknya coba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai penegasan politik identitas yang melekat pada diri mereka. Berikut di bawah ini catatan tentang akar historis lahirnya tiga partai politik Islam menjelang pemilu 1999, yaitu PAN, PKB dan PKS (pada pemilu 1999, bernama PK/Partai Keadilan).

### 1. PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) dideklarasikan pada 23 Agustus 1998. Kelahirannya dibidani oleh tokoh-tokoh pengggerak reformasi. Berbagai tokoh dengan latar belakang menjadi peletak dasar partai tersebut. Namun demikian, partai ini seringkali diidentikkan sebagai artikulator politik Muhammadiyah, satu organisasi keagamaan Islam modernis. Hal ini didasarkan karena tokoh utamanya, yaitu Amin Rais, adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Selain itu, deklarasi dan pendukung utama pendirian partai difasilitasi oleh Muhammadiyah. Dan basis massa partai ini berasal dari kalangan masyarakat

kelas menengah-atas terdidik kota, dan terutama pengikut Muhammadiyah.<sup>9</sup> Bahkan Bambang Cipto, menyatakan bahwa “Urbanisme partai [PAN] didukung oleh komunitas Muhammadiyah yang secara tak terelakkan menjadi *backbone* partai.”<sup>10</sup>

Secara resmi, Muhammadiyah memang tidak memiliki kaitan dengan PAN. Relasi di antara keduanya dijembatani oleh Amien Rais yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memilih untuk tidak terlibat dalam politik kepartaian. Pengganti Amien Rais, Buya Syafi’i Ma’arif, menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tetap menjaga jarak dengan dunia politik, namun organisasi ini mengizinkan anggotanya masuk politik sebagai individu. Meskipun demikian, pernyataan resmi tersebut tidak menghalangi para kader Muhammadiyah di daerah-daerah untuk membantu PAN mendirikan cabang-cabang di daerah masing-masing.<sup>11</sup>

### 2. PKB

<sup>9</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, h. 143.

<sup>10</sup> Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 56.

<sup>11</sup> Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), h. 144.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PKB lahir dari rahim NU dengan motor utama Abdul Rahman Wahid (Gus Dur). Pendirian PKB oleh NU sebagai upaya untuk mengatasi dua kecenderungan besar yang muncul di NU pasca Orde Baru. Satu kelompok lainnya adalah menginginkan NU tetap menjadi ormas keagamaan. Jalan keluarnya adalah NU membidani pendirian partai, dalam hal ini PKB, untuk fasilitas dan artikulasi kepentingan warga NU tanpa menjadikan NU sebagai partai politik. Dengan demikian, relasi antara NU dengan PKB adalah bersifat historis, kultural, dan aspiratif. Historis artinya pembentukan PKB bertalian erat dengan NU. Kultural berarti perjuangan PKB harus memerhatikan lingkungan kultural khas yang dianut oleh NU, yaitu lingkungan kebudayaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sedangkan aspiratif artinya PKB berkewajiban untuk memerjuangkan cita-cita politik yang dimiliki warga NU.<sup>12</sup>

Gema kemunculan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup menggugah semangat warga NU untuk

<sup>12</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, h. 142.

menatap masa depan yang lebih cerah, setelah 32 tahun menjadi kelompok yang dipinggirkan. PKB yang dilahirkan dari NU untuk bangsa Indonesia tentunya harus mencontoh *Wali Songo* dalam rangka membangun tatatan masyarakat, sangat mengutamakan gerakan moral dan spiritual.<sup>13</sup>

Tuntutan warga *Nahdhiyin* agar Nahdhatul Ulama (NU) mendirikan partai atau berubah menjadi partai politik begitu besar. Tak sedikit di antara warga *Nahdhiyin* yang sudah tidak sabar menanti kehadiran partai yang dibidani orang-orang NU. Meladeni tuntutan seperti itu tentu tidak mudah bagi *jam'iyah* NU. Sebagai konsekuensi dari kembali ke *khittah* 1926, NU adalah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah*, yakni organisasi yang menjaga jarak dari keterlibatan politik secara langsung. Dengan mendirikan partai politik, berarti NU telah melakukan pengingkaran terhadap gerakan kembali ke *khittah* 1926 yang dilakukan pada 1984. Dengan pengingkaran itu pun, secara konstitusional, hasil dilakukan muktamar, sebuah institusi tertinggi pembuat keputusan. Tapi menolak

<sup>13</sup> Agoes Ali Masyhuri, "*Kebangkitan Politik Warga NU*" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), h. 257-258.

tuntutan warga merupakan pengingkaran terhadap realitas.<sup>14</sup>

Untuk itu, langkah yang diambil Pengurus Besar (PB) NU cukup strategis. Pengelola *jam'iyah* NU itu berketetapan bahwa NU tetap sebagai *jam'iyah diniyah ijtimaiyah*, bukan partai politik, dan tidak ada akan mendirikan partai politik. Meskipun demikian, PBNU mempersilahkan warga *Nahdhiyin* mendirikan partai asal dilakukan secara konseptual dan melalui pertimbangan-pertimbangan matang. PBNU pun sudah membentuk tim yang bertugas memfasilitasi keinginan besar itu. Menurut Kacung Marijan:

“Keputusan PBNU itu cukup realistis, dan dalam taraf tertentu sesuai dengan keinginan kalangan intelektual dan kaum muda NU. Dalam merespon tuntutan untuk mendirikan partai politik, kelompok ini cukup kritis. Memang mereka bisa memahami tuntutan itu. Tapi mereka juga [tidak] ingin melihat NU terjebak oleh kegiatan politik praktis yang menyeret seluruh energy dan

potensi yang dimiliki, sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya. Dalam bahasa Kiai Mustofa Bisri, kelompok ini tidak ingin melihat NU tereduksi hanya sebagai partai politik *an sich*. Padahal, sebagai organisasi besar, NU memiliki potensi untuk melakukan berbagai kegiatan, bukan hanya politik.”<sup>15</sup>

Masih menurutnya, politik NU harus ditempatkan pada posisi subordinasi, bukan dalam posisi ordinasi. Penempatan demikian akan membuat *jam'iyah* NU memiliki dua gerakan sekaligus. Sejumlah jamaahnya melakukan gerakan politik melalui pembentukan partai politik, jamaah lain dan *jam'iyah* NU sendiri tetap konsisten dengan *khittah* 1926.<sup>16</sup> Berdirinya NU, memang sudah sejak awal diniatkan sebagai gerakan kultural. Organisasi tersebut, didirikan oleh para ulama tradisional dan mampu bertahan sampai saat ini, juga karena ikatan-ikatan kultural. Keterikatan yang kuat, hubungan kiai dengan para santrinya, doktrin keagamaan yang berdasarkan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah*, dan

<sup>14</sup> Kacung Marijan, “Politik NU” dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), h. 261-263.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 263.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 263.

simbol-simbol sosio-kultural yang terus berkembang dalam komunitas NU terbukti telah menjadikan ormas ini kenyal dari berbagai guncangan. Meski sejak berdiri telah beberapa kali bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan politik dalam rezim yang berbeda-beda, NU ternyata masih mampu bertahan menjadi organisasi keagamaan Islam terbesar.<sup>17</sup>

### 3. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berdiri menjelang pemilu 1999, dengan nama Partai Keadilan (PK). Partai ini menjadi fenomenal karena dilahirkan dari gerakan *tarbiyah* (aktifis muslim kampus). Secara harfiah, *tarbiyah* berarti pendidikan, namun kata tersebut menurut Liddle dan Mujani, mendapat makna lebih khusus bagi PKS, yakni membangkitkan kesadaran tentang Islam atau *Islamic consciousness raising*.<sup>18</sup> Gerakan *tarbiyah* merupakan *prototype* dari gerakan dakwah kampus yang mengedepankan aspek pendidikan atau pembinaan jamaah dengan mengacu pada *marhalah* dakwah yang ditempuh Rasulullah; berupaya mengaplikasikan

Islam secara menyeluruh (*kaffah*), komprehensif (*syamil*), dan manusiawi (*insani*). Gerakan ini pada mulanya digagas oleh Hasan Al-Banna. Pada perkembangannya gerakan ini mampu melawan *trend* politik dan budaya yang cukup kuat di Mesir pertengahan abad 20, menjadi gerakan yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah, Asia, sampai Indonesia, dan kini menjadi gerakan global.<sup>19</sup>

Gerakan *tarbiyah* dinilai berhasil mengartikulasikan dirinya di Indonesia secara nyata dan juga dalam penggalangan kekuatan politik berturut-turut dari PK pada awalnya sampai berubah menjadi PKS di pemilu 2004.<sup>20</sup> Berdirinya partai tersebut sebagai bentuk perjuangan secara formal dan legal dalam rangka mencapai keinginan diterapkannya ideologi Islam secara formal di Indonesia. Menurut Mashad, partai tersebut adalah salah satu representasi dari partai-partai Islam yang mendambakan penerapan syariah Islam bagi umat Islam di Indonesia.<sup>21</sup>

### Fragmentasi Partai-partai Politik Islam

<sup>17</sup> Arief A. dan Tjahjani R.W., "PKB, Parameter Soliditas Politik NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), h. 273.

<sup>18</sup> Kuskrindo Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, h. 141.

<sup>19</sup> Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>21</sup> Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 102 dan 169.

Dalam konteks pembahasan fragmentasi partai-partai politik Islam, fragmentasi<sup>22</sup> diartikan sebagai pecahnya kekuatan politik Islam ke dalam berbagai kekuatan seperti dalam wujud beberapa partai Islam. Setiap partai Islam bukanlah representasi tunggal dari partai Islam lainnya. Tetapi, pada diri setiap partai Islam memang merupakan bagian dari partai itu sendiri, dan masing-masing memiliki bentuk dan penampilan politik yang berbeda.<sup>23</sup>

Mengenai akar dari fragmentasi masyarakat Indonesia, kita bisa lihat dari penelitian Robert Jay yang telah membuat kesimpulan tentang dikotomi antara *santri* dan *abangan*. Perhatian utamanya adalah masalah skisme keagamaan yang menyebabkan *skisme politis* yang berkembang antara subkultur santri (muslim yang taat) dan subkultur abangan (muslim yang Jawa-is). Dengan dasar kajian seperti itu, Robert Jay mencoba menjelaskan perjalanan politik Islam dalam konteks Indonesia tahun 1950-an. Pola

konfrontasional yang berkembang pada pemilu 1955, terlihat sangat jelas, yaitu pertarungan antara dua kelompok besar Masyumi dan NU (kelompok santri) dengan PNI dan PKI (kelompok abangan).<sup>24</sup>

Dalam hal yang hampir sama, dimensi kebudayaan pada analisa Geertz mengenai aliran adalah penting. Menurutnya aliran merupakan masyarakat yang mempunyai landasan organisasi modern, dan muncul dari kerangka sosio-kultural yang lebih tua. Konsep aliran Geertz memperkaya peralatan analisis kita, sebab konsep tersebut merupakan alat yang berharga untuk memahami kaitan antara ide partai nasional dengan pola kultural pada tingkat yang paling dasar di Indonesia.<sup>25</sup>

Berbeda dengan Robert Jay, Geertz membagi tiga varian sosio-kultural yang terkenal dengan istilah *Abangan*, *Santri*, dan *Priyayi*. Selanjutnya ia memaparkan perbedaan-perbedaan umum antara ketiga varian tersebut di

<sup>22</sup> Fragmentasi dalam kajian ini diberi batasan pengertian sebagai terpecahnya sesuatu yang tunggal menjadi beberapa bagian. Setiap bagian hakikatnya tetap merupakan bagian dari sesuatu yang tunggal tadi. Tetapi, setiap bagian tidak dapat mengklaim sebagai wakil dari (perwujudan) yang tunggal dan utuh tadi. Setiap bagian mengandung sebagian unsur yang sama dari sesuatu yang tunggal, tapi dari setiap bagian bisa berbeda bentuknya.

<sup>23</sup> Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 26.

<sup>24</sup> Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 32-37.

<sup>25</sup> Lihat Herbert Feith, "Studi Politik Indonesia: Suatu Tujuan dan Pembelaan" dalam Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), h. 21.



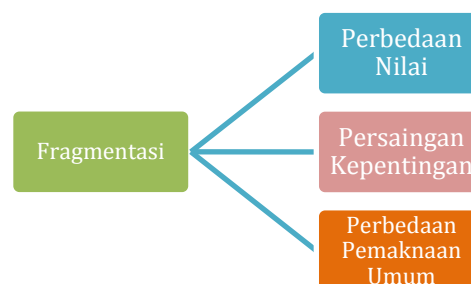
dalam karyanya *The Religion Of Java*, Ia menulis:<sup>26</sup>

“Abangan mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek animistis dari seluruh sinkretisme Jawa dan secara luas berkaitan dengan unsur petani di kalangan penduduk; santri mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek Islam sinkretisme di atas dan umumnya berkaitan dengan unsur dagang (juga unsur-unsur tertentu dalam pertanian); dan priayi menekankan aspek-aspek Hinduistis dan berkaitan dengan unsur birokrasi.”<sup>27</sup>

Kategorisasi Geertz tersebut, mungkin secara antropologis tidak terlepas dari perbedaan arus pemikiran

dan sikap politik Islam itu sendiri.<sup>28</sup> Kondisi kekuatan-kekuatan politik Islam kemudian memunculkan fragmentasi partai-partai politik Islam. Berikut tiga faktor utama penyebab fragmentasi.

**Gambar 1.** Tiga Faktor Utama Penyebab Fragmentasi.



Sumber: Diilustrasikan Berdasar pada Skema Mashad, 2008.

Dengan demikian, jelaslah bahwa fragmentasi politik terjadi setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Perbedaan interpretasi nilai, persaingan kepentingan, dan perbedaan pemaknaan kepentingan umum. Seiring bergesernya wujud fragmentasi dari sekedar perbedaan pemaknaan kebijakan umum, menjadi persaingan kepentingan, atau bahkan pada perbedaan nilai, biasanya akan terjadi pergeseran dari kerja sama ke arah persaingan, yang akhirnya menjadi konflik. Semakin kental tingkat

<sup>26</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 37.

<sup>27</sup> Banyak peneliti Indonesia modern yang mengkritik kategorisasi Geertz tersebut. Diantaranya, Robert W. Hefner, Mitsuo Nakamura, dan lain-lain. Sejumlah kritik diarahkan untuk menolak pembilahan religio-kultural seperti itu. Karena memang varian abangan-santri secara luas dipandang sebagai suatu hal yang sah dalam perbedaan keagamaan. Akan tetapi, varian priyayi tidak seperti itu. Priyayi banyak dipandang sebagai status ketimbang kategorisasi keagamaan. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, h. 37-38.

<sup>28</sup> Dwi Purwoko, dkk., *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler* (Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001), h. 7.

fragmentasi, semakin kuat pula kecenderungan intensitas konfliknya.<sup>29</sup>

*Pertama*, perbedaan interpretasi nilai. Konstelasi politik pasca Orde Baru, memang terdapat fenomena menarik dalam wacana politik Islam di Indonesia. Hal itu ditandai dengan terpecah belahnya kultur politik Islam, substansialisme dan formalisme (walaupun memang masih tetap bergaris pada sub kultur tradisional dan modernis), tentu saja dengan segala tingkatannya. Polarisasi tersebut, malah terefleksi dalam proses fragmentasi pembentukan partai, yang secara jelas disimak dari berdirinya PAN dan PKB.<sup>30</sup> Kehadiran dua partai dengan massa pendukung yang besar dan luas dari kalangan Islam tersebut, memiliki *platform* pluralisme dan kebangsaan di samping komitmen keagamaan dengan interpretasi mereka terhadap nilai-nilai Islam. Keberadaan dua partai semacam itu menunjukkan adanya transformasi dan reorientasi politik yang lebih substantif.<sup>31</sup>

*Kedua*, persaingan dan perbedaan kepentingan. Perbedaan visi, orientasi dan kepentingan elit politik merupakan

cerminan dari sebab-sebab terjadinya fragmentasi politik Islam.<sup>32</sup> Seperti alasan tentang mengapa warga NU ingin memiliki partai politik sendiri. Hal demikian tidak terlepas dengan alasan yang sarat dengan kepentingan. Faktor kepentingan juga terlihat dari alasan yang dikemukakan K.H. Cholil Bisri bahwa NU perlu memiliki partai sendiri, agar tidak menjadi pendorong gerbong orang lain (maksudnya partai lain). Yang secara tidak langsung berarti “Enak di orang, tak enak di kita”. Argumentasi ini tentu tidak lepas dari faktor historis, di mana NU mendapat jatah yang tidak proporsional ketika bergabung dalam Masyumi dan kemudian PPP. Pernyataan dari kiai sepuh tersebut mengindikasikan bahwa faktor kepentingan menjadi sumber dan landasan dari fragmentasi politik Islam.<sup>33</sup> Disamping itu, yang cukup nyata adalah bagaimana partai-partai politik Islam seperti PAN, PKB dan PKS atau elitnya coba mengejawantahkan dan/atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari basis massa atau pendukung utamanya, yaitu PAN dengan warga Muhammadiyah, PKB dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 41-42 dan 123.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 163.

<sup>31</sup> M. Arskal Salim, “Islam dan Relasi Agama-negara di Indonesia” dalam Abdul Mun’im ed., *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), h. 11.

---

<sup>32</sup> M. Arskal Salim, “Fragmentasi Politik Islam” dalam Abdul Mun’im, ed., *Islam di Tengah Arus Transisi*, h. 126.

<sup>33</sup> Dhurudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 177-178.

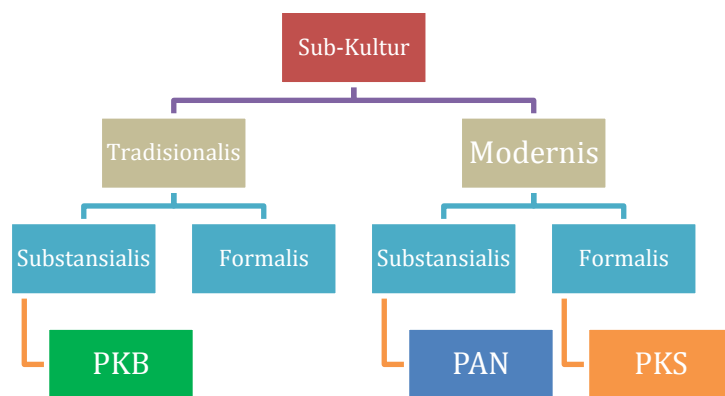
warga *Nahdhiyin* (NU) dan PKS dengan komunitas gerakan *Tarbiyah*.

*Ketiga*, Perbedaan pemaknaan kebijakan umum. Dalam konteks kepartaian, perbedaan dalam nilai yang dianut oleh sebuah partai pada akhirnya sangat menentukan pemaknaan partai tentang “kebijakan umum”. Perbedaan sangat kentara dapat dijumpai secara jelas pada level pemaknaan kebijakan yang rendah, seperti tercermin dari program-program partai yang memperlihatkan variasi tujuan, sehingga menjadi bukti adanya perbedaan kecenderungan dalam pemaknaan kebijakan. Perbedaan datang dari PKB dan PAN dengan PKS. Jika PKB dan PAN mengklaim mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, maka PKS mengidentifikasikan diri sebagai partai Islam yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islam-an universal dengan menerapkan syariat Islam secara formal (formalisasi) di Indonesia.<sup>34</sup>

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pasca tumbangannya rejim Orde Baru begitu beragam dan cenderung terfragmentasi. Pada titik ini, terlihat bahwa para elit politiknya coba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai

penegasan politik identitas yang melekat pada diri mereka. Dengan begitu, dalam implementasi pemikiran di atas, di antara partai-partai Islamis terpatritasi fragmentasi antara satu partai dengan partai lainnya, di antaranya dalam dimensi kultural (modernis versus tradisional) dan ideologis (formalis versus substansialis).<sup>35</sup> Berikut penulis sajikan gambar ilustrasinya.

Gambar 2. Fragmentasi Politik PAN, PKB dan PKS



Sumber: Diilustrasikan oleh Penulis.

Selaras dengan ilustrasi di atas, partai-partai politik Islam dapat tergolong ke dalam dua dimensi besar itu yaitu dimensi kultural dan ideologis. *Pertama*, dimensi kultural, di dalamnya terdapat disparitas antara kelompok tradisional dan modernis. Kelompok tradisional, didasarkan pada nilai yang ada di dalamnya mencoba melakukan domestifikasi ajaran Islam (akulturasi yang dilakukan oleh walisongo dan

<sup>34</sup> Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 170-172.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 41-42 dan 123.

diteruskan para ulama/kiai). Partai yang masuk dalam kategori ini adalah PKB. Sedangkan kelompok modernis, mengacu pada pembaruan Islam yang terpengaruh pada dalam konteks global yang berlandaskan pada pemikiran politik tokoh-tokoh 'modern' atau tepatnya kontemporer. PAN dan PKS termasuk dalam kategori ini. *Kedua*, dimensi ideologis, yang terbelah menjadi kelompok formalis dan substansialis. PKS masuk dalam kategori partai Islam formalis. Oleh karena, partai tersebut melakukan formalisasi "Islam" ke dalam partainya baik secara asas/ideologi maupun nilai perjuangannya. Sementara PAN dan PKB merupakan partai Islam yang masuk dalam kategori kelompok substansialis, karena tidak melakukan formalisasi "Islam" dalam asas atau ideologinya dan lebih mengutamakan gerakan kultural dibanding formalisasi.<sup>36</sup>

### **Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Islam di Arena Elektoral**

Pada bagian ini, penulis coba menyajikan tentang bagaimana konstelasi pergulatan partai-partai politik Islam seperti PAN, PKB, dan PKS dengan memanfaatkan politik identitas dan/atau simbol-simbol keagamaan sebagai komoditas politik untuk meraih

simpati para pemilih. Hal ini selaras dengan apa yang telah dituliskan oleh Abdilllah, yang menyatakan bahwa "kekuatan agama dalam mengikat individu dalam suatu ikatan kebersamaan sangat kuat, agama menjadi komoditas politik yang kental bagi beberapa kelompok individu. Partai-partai yang mendasarkan asasnya pada agama, merupakan bukti bahwa keterlibatan agama cukup kuat."<sup>37</sup> Sehingga ikatan pemilih Muslim terhadap partai-partai politik Islam kemungkinan besar dapat mampu menopang perolehan suara suatu partai.

Konteks sosiologis ini tampaknya digunakan oleh elit-elit politik Islam untuk mendirikan serta selanjutnya mempertahankan eksistensi partai-partai Islam. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas tentu dengan sendirinya akan mendapat dukungan dari umat Islam. Karena itu, adanya partai-partai politik Islam secara otomatis akan didukung oleh umat Islam. Apalagi ditambah dengan perspektif teologis, di mana perlunya alat perjuangan untuk mewujudkan aspirasi Islam. Dengan konteks ini maka antara faktor sosiologis dan teologis bertemu, saling mengisi dan

---

<sup>36</sup> Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 123-124.

---

<sup>37</sup> Ubed Abdilllah S., *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, h. 66.

menunjang satu sama lain.<sup>38</sup> Berikut ini data perolehan suara PAN, PKB dan PKS dari pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2019.

Tabel 1. Perolehan Suara PAN, PKB dan PKS dari Pemilu 1999-2019

Partai/ Tahun Pemilu	PAN		PKB		PKS	
	Total Suara	%	Total Suara	%	Total Suara	%
1999	7.528. 956	7, 12 %	13.33 6.982	12 ,6 1 %	1.436. 565	1,36 %
2004	7.303. 324	6, 44 %	11.98 9.564	10 ,5 7 %	8.325. 020	7,34 %
2009	6.254. 580	6, 01 %	5.146. 122	4, 94 %	8.206. 955	7,88 %
2014	9.481. 621	7, 59 %	11.29 8.957	9, 04 %	8.480. 204	6,79 %
2019	9.572. 623	6, 84 %	13.57 0.097	9, 69 %	11.49 3.663	8,21 %

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada pemilu 1999, PAN berhasil memperoleh 7,12% suara secara nasional. Pada pemilu waktu itu, basis dukungan suaranya yang paling kuat adalah di wilayah-wilayah perkotaan. Basis

dukungan ini sedikit lebih kuat di Jawa ketimbang Luar Jawa. Basis dukungan terkuat PAN adalah di Sumatera Barat, yang berhasil menjadi *runner up* setelah Partai Golkar. Begitu juga di Aceh, partai tersebut memperoleh urutan kedua setelah PPP. Dan juga di Yogyakarta, di mana PAN menempati juga urutan kedua setelah PDI-P.<sup>39</sup> Kita mengetahui, bahwa daerah perkotaan dan pusat pendidikan merupakan basis massa Muhammadiyah. Sehingga asumsinya adalah sokongan perolehan suara partai ini pada pemilu tahun itu berasal dari warga Muhammadiyah. Sedangkan, pada pemilu 2014, PAN berhasil meningkatkan perolehan suaranya dengan meraih 9.481.621 suara atau 7,59%. Suara ini cukup meningkat signifikan yaitu sekitar 3 juta suara. Dan partai ini, berhasil menjadi juara di daerah Sulawesi Tenggara. Adapun pada pemilu 2019 secara persentase mengalami penurunan, namun PAN sebenarnya mengalami kenaikan perolehan suara riil meskipun kenaikannya tidak signifikan.

PKB pada pemilu 1999 berhasil menjadi juara ketiga perolehan suara nasional. Namun, basis dukungan massa dari partai ini terbatas di Jawa. Karena

<sup>38</sup> Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, h. 118.

<sup>39</sup> Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia* (Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003), h. 38.

hampir 90% suaranya berasal dari Jawa.<sup>40</sup> Dan yang menarik dan unik adalah partai ini sangat disokong dari para pemilih di pedesaan. Karakter yang memang cocok sebagai partai warga *nahdhiyin* yang kebanyakan berada di daerah pedesaan. Pada pemilu 2014, PKB mengalami peningkatan perolehan yang fantastis yaitu sekitar 6 juta suara. Dari 5.146.122 suara meningkat menjadi 11.298.957 suara. Pada pemilu ini pun, PKB cukup memperoleh suara yang besar di Jawa Timur yang merupakan basis utamanya. Seperti kita ketahui, bahwa daerah itu merupakan kawasan dengan sejumlah kiai sepuh dan warga *nahdhiyin* yang merupakan penyokong utama PKB. Kegemilangan partai ini terus terlihat dengan perolehan suara yang meningkat sebanyak 2 juta suara pada pemilu 2019.

Sedangkan, PKS (pada 1999, bernama PK) memperoleh 1.436.565 suara. Akan tetapi partai ini berhasil naik secara signifikan pada pemilu 2004 dengan memperoleh 8.325.020 suara. Pada pemilu 2009, partai tersebut memperoleh suara 7,89% atau 8.206.955 suara. Akan tetapi, pada pemilu 2014, dengan berlandaskan pada *persentase* mengalami penurunan menjadi 6,79%. Namun sebenarnya, partai tersebut

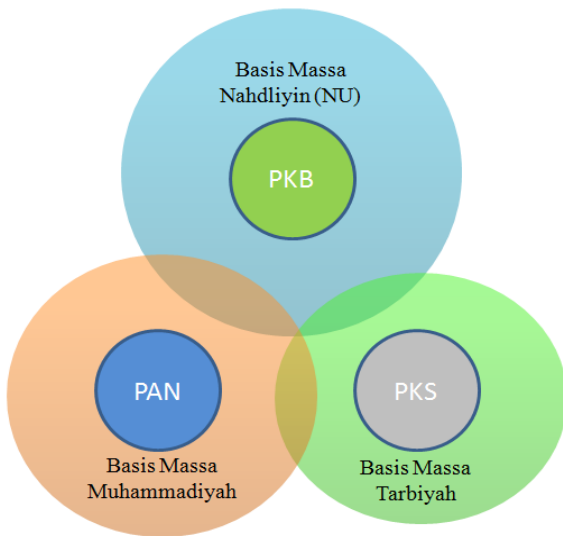
mengalami peningkatan perolehan suara lebih kurang sebanyak 280.000 suara. Yang perlu dipahami bahwa, sejak pemilu 2004-2014, perolehan suara PKS cenderung terpaku di angka 8 juta suara. Stagnasi seperti ini yang coba diasumsikan bahwa ternyata kaderisasi yang menurut beberapa tokoh internal maupun eksternal dari PKS berjalan sangat baik, namun kenyataannya tidak begitu. Mentoknya suara partai ini merupakan bukti bahwa sistem kaderisasi internal pun mengalami hambatan seperti partai-partai lainnya. Namun pada pemilu 2019, partai kaum *Tarbiyah* ini mengalami peningkatan perolehan suara sebanyak 3 juta suara.

Berikut di bawah ini adalah gambar yang penulis sajikan untuk mendeskripsikan bagaimana pergulatan partai-partai Islam (PAN, PKB, dan PKS) mencoba mendorong politik identitasnya terhadap basis pendukung utamanya masing-masing dengan mengampanyekan isu atau persoalan keagamaan dan bersamaan dengan itu juga mereka menysasar basis massa di luar basis inti masing-masing.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 37.

Gambar 3. *Buble* Partai-partai Politik  
Islam dan Basis Massanya



Sumber: Diilustrasikan oleh Penulis.

Optimalisasi politik identitas kerap dipraktekkan oleh PAN, PKB dan PKS dan menjadi keharusan dalam mencapai target elektoral. Mari kita menengok fenomena politik nasional terutama pada 2017 bahwa tema Islam Politik sangat menarik untuk diobservasi. Menguatnya sentimen identitas Islam ketika pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan menjelang pemilu 2019, melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF-MUI yang sangat menyedot perhatian publik. Mobilisasi politik melawan kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta pada saat itu telah membuka dua ruang politik krusial. Pertama, partai Islam seperti PAN, PKB, dan PKS berupaya mengkapitalisasi atau memanfaatkannya

dengan semakin memperbesar wacana politik identitas yang memang sudah lama mereka suarkan. Karakteristik yang melekat pada satu kelompok dalam hal ini partai bercorak Islam adalah tumbuhnya perasaan dalam satu komunitas berlabel identitas keagamaan di antara para anggota atau kadernya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan hubungan yang kuat. Selain itu, tumbuh juga perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya masing-masing.<sup>41</sup>

Kedua, upaya tersebut mensyaratkan aliansi atau persatuan dengan elemen lain di luar basis massa Partai Islam baik itu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), individu, maupun dengan Partai lain yang bercorak nasionalis serta sejumlah perubahan kebijakan internal partai. Perkembangan partai Islam di Indonesia pada derajat tertentu menunjukkan ironi dan paradoks. Dengan demikian, pergulatan politik identitas di Indonesia menjadi lebih dinamis dan tidak statis. Tindakan adaptif dan perubahan tindakan partai politik Islam sebagai respon atas realitas konkrit politik dan perkembangan-perkembangan yang ada. Islam Politik akan ditempatkan pada

<sup>41</sup> Ubed Abdillah S., *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, h. 67.

konteks bukan hanya pada unsur-unsur identitas maupun ideologis tapi juga persilangannya dengan upaya mencapai target kekuasaan politik dan keberhasilan dalam pemilihan umum baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang.

PAN, PKB dan PKS sepanjang ini melakukan perluasan segmentasi dukungan melampaui basis intinya. Bahkan mereka saling berkelindan dan bergulat untuk merangkul komunitas di luar basis intinya. Bagaimana tidak, PAN tidak lagi hanya mengkonsolidasikan dukungan dari basis Muhammadiyah dan perkotaan tapi juga menysasar basis Nahdlatul Ulama dan pedesaan. PKB juga terus memperluas sasarannya ke basis Muhammadiyah, masyarakat perkotaan dan generasi milenial. Begitu juga dengan PKS, meski di satu sisi partai atau elitnya tetap menjaga dan memelihara basis inti pendukung konservatifnya, namun sisi lain melakukan perluasan atau pengembangan basis elektoralnya secara progresif seperti menysasar basis NU dan Muhammadiyah, sehingga partai ini mampu menaikkan perolehan suara signifikan sebanyak 3 juta suara pada 2019.

Strategi penguatan basis elektoral semacam itu, sejalan dengan pandangan Kirchheimer tentang hakekat partai

*catch-all* yakni partai terbuka yang menysasar perluasan segmentasi dukungan lintas kelompok tanpa pandang bulu atau menysasar siapapun atau kelompok manapun yang sedianya mau mendukung dan memilih partai-partai Islam pada saat pemilu.<sup>42</sup>

Partai-partai Islam seperti PAN, PKB dan PKS terlihat begitu rasional dalam menghadapi kontestasi politik elektoral. Hal itu dapat dilihat dari tingkah laku pola yang dipraktikkannya di beberapa pemilu terakhirnya. Mereka cenderung begitu menghendaki perolehan suaranya dapat semaksimal mungkin. Oleh karena itu, baik PAN, PKB dan PKS melakukan beragam cara atau strategi untuk menggolkan hal itu, salah satunya dengan cara mengembangkannya segmentasi basis dukungannya ke tengah atau basis massa mainstream sehingga terjadi pergulatan antara ketiga partai Islam tersebut. Meski demikian, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan basis massa tradisionalnya yang militant agar tetap menopang perolehan suara partainya.

### **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini tim penulis menggaris bawahi bahwa Islam Politik yang diwakili oleh partai-partai Islam

---

<sup>42</sup> Otto Kirchheimer, "Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat," dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, h. 45-46.



seperti PAN, PKB dan PKS ternyata harus mendorong kompromi dan langkah pragmatis. Wacana politik identitas seringkali dimanfaatkan sebagai tameng untuk mengadvokasi pencapaian-pencapaian politik jangka pendek. Pada gilirannya, pergulatan identitas Islam Politik boleh jadi bermuara pada segenap perubahan signifikan mekanisme internal partai dan reinterpretasi nilai partai ke arah yang lebih moderat dan akomodatif terhadap lingkungan politiknya agar dapat mendulang perolahan suara yang signifikan utamanya di ranah elektoral.

#### Daftar Pustaka

- A. Arief. dan W., Tjahjani R. “PKB, *Parameter Soliditas Politik NU*” dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung, Pustaka Hidayah: 1999.
- Ambardi, Kuskrido. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan, 2000.
- Azra, Azyumardi. “*Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat,*” dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Bambang, Cipto. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Edward, Djony. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Evans, Kevin Raymond *Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia*. Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003.
- Feith, Herbert. “Studi Politik Indonesia: Suatu Tujuan dan Pembelaan” dalam Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.
- F., Eickelman, Dale, dan James, Piscatori. *Ekspresi Politik Muslim*. Penerjemah Endi Haryono dan Rahmi Yunita. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut*.

- Kazhim, Musa. dan Hamzah, Alfian. 5 *Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung, Pustaka Hidayah: 1999.
- Kirchheimer, Otto. "Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat," dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana: 1996.
- Leege. David C., dan Kellstendt, Lyman A. ed., *Agama dalam Politik Amerika: Rediscovering the Religious Factor in American Politics*. Penerjemah Ahmad Baiquni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Marijan, Kacung. "Politik NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 *Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung, Pustaka Hidayah: 1999.
- Marsden, George M. *Agama dan Budaya Amerika*. Penerjemah B. Dicky Soetadi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Masyhuri, Agoes Ali. "Kebangkitan Politik Warga NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 *Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung, Pustaka Hidayah: 1999.
- O'Donnell, Guillermo. Scmitter, Phillippe C. dan Whitehead, Laurence. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Penerjemah Nurul Agustina. Jakarta: LP3S, 1993.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare: 2012.
- Purwoko, Dwi. dkk., *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler*. Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001.
- Salim, M. Arskal. "Islam dan Relasi Agama-negara di Indonesia" dalam Abdul Mun'im ed., *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas, 2000.
- S., Ubed Abdillah. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.